PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK RESOLUSI KONFLIK DAN PERDAMAIAN

Oleh*:*
Husnatul Mahmudah
Institut Agama Islam (IAI) IAI Muhammadiyah Bima
arraynez@gmail.com

Abstrak:

Berbagai konflik yang terjadi membutuhkan beberapa upaya solutif untuk meminimalisir konflik dan menciptakan serta menjaga perdamaian (*peace building* dan *peace keeping*). Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan lewat pendidikan. Pendidikan dipercaya sebagai sebuah pendekatan untuk mentransformasi nilai-nilai yang berkontribusi membangun perdamaian. Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat mengambil peran untuk membantu menciptakan kondisi damai, disamping meningkatkan moralitas dan spiritualitas anak didik. Meskipun dalam realitasnya terlihat PAI menumpulkan nalar kritis anak didik, karena pembelajaran dilakukan dalam perspektif "kacamata kuda." Paradigma pembelajaran PAI dapat dikembangkan dalam untuk orientasi dialog dan perspektif pendidikan multikultural.

Kata Kunci: *PAI, Resolusi Konflik, Perdamaian, Dialog, Multikultural.*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, tidak terlepas dari berbagai macam konflik yang mewarnai peradaban. Setidaknya ada lima hal yang umumnya menjadi sumber konflik, yaitu agama, etnis, ras, suku dan golongan. Kekerasan (*violence*) dan konflik (*conflict*) di berbagai tempat di dunia seperti Thailand, Mesir, India, Somalia dan Indonesia tidak lepas dari salah satu dari 5 faktor tersebut. Dalam perkembangannya diketahui bahwa konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja tetapi juga merupakan gabungan antar faktor yang satu dengan yang lainnya.

Kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia[1] merupakan contoh nyata dari kekerasan dan konflik horisontal yang sangat merugikan, baik itu jiwa, materi maupun keharmonisan masyarakat Indonesia. Kekerasan dan konflik horisontal tersebut merupakan bagian dari kemajemukan yang tidak dikelola dengan baik dan kurangnya kesadaran akan persatuan sebagai sebuah *integrating force* yang dapat mengikat seluruh keragaman etnis, suku, budaya dan agama tersebut. Di Indonesia sendiri, konflik dan krisis yang diakibatkan oleh kebekuan masyarakat dalam menafsirkan agama dan ideologi telah menjadi fakta yang tidak

[1] Kekerasan etnis di Kalimantan Barat muncul sejak tahun 1933. Kemudian berturut-turut sejak 1967, 1968, 1976, 1977, 1979, 1983, 1993, 1996 dan 199. Di kalimantan tengah pada akhir 2000. M. Ainul Yakin, *Pendidikan Multikultural: Cross-culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 191

terbantahkan dewasa ini. Beberapa konflik antara Muslim dan Nasrani sepeerti di Maumere (1995), Surabaya, Situbondo dan Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Jakarta, Solo dan Kupang (1998), Psoso dan Ambon (1999-2002), berbagai gerakan radikalisme dan munculnya kasus-kasus terorisme dengan dalih jihad atas nama agama, tidak lepas dari tafsir masyarakat atas agama dan ideologi yang mengitarinya.

Menyikapi munculnya berbagai kasus kekerasan atas nama agama di berbagai daerah tersebut, oleh para analis sosial politik menitikberatkan pada ketimpangan sosial-ekonomi sebagai akar konflik. Sangat sedikit yang menyadari bahwa kekerasan itu disebabkan oleh model pendidikan yang diterapkan oleh institusi-institusi agama tertentu dan model pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah.

Tulisan ini berusaha untuk mengkaji konflik agama dalam pluralitas beragama di Indonesia, dan upaya untuk menganalisis peran pendidikan agama Islam dalam untuk resolusi konflik dan upaya menciptakan perdamaian.

Konflik Agama dalam Bingkai Pluralitas Kehidupan Beragama di Indonesia

Intensitas kekerasan di Indonesia saat ini bahkan hampir menyamai negara-negara yang sedang dalam situasi perang sipil. Tidak dapat disangkal bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang akrab dengan kekerasan. Meskipun banyak kalangan menyangkal bahwa budaya kekerasan adalah budaya Indonesia. Namun, pada kenyataannya, saat ini budaya anti-kekerasan semakin tersingkir dan sebaliknya budaya kekerasan kelihatan semakin mapan.

Dalam berbagai pertentangan itu, isu SARA begitu cepat menyebar ke berbagai lapisan sehingga tercipta suasana konflik. Eskalasi pertentangan yang dilapisi baju SARA seringkali menciptakan konflik kekerasan yang lebih mencengangkan dan meresahkan. Dalam suasana seperti ini agama sering menjadi titik singgung paling sensitif dan esklusif dalam pergaulan pluralitas masyarakat. Perjumpaan antar iman dan agama yang berbeda diruang publik seringkali menimbulkan ketegangan bahkan konflik keagamaan yang juga tidak jarang menggunakan kekerasan fisik. Konflik ini merupakan fakta kehidupan umat beragama yang timbul tenggelam dalam sejarah.[2]

Dalam konteks posmodernisme, pluralitas menjadi salah satu struktur fundamental. Segala fenomena menampakkan wajah pluralistik, sehingga sulit dipertahankan paradigma tunggal dalam diskursus apapun, baik budaya,

[2] Konflik seperti ini pada mulanya bukan karena faktor agama itu sendiri, melainkan karena berbagai sebab terkait. Agama biasanya dibawa sebagai faktor legitimasi atau untuk menutupi konflik yang sesungguhnya. *Pertama*, krisis di berbagai bidang beberapa tahun yang lalu pada akhirnya menciptakan hilangnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap aparat pemerintahan. *Kedua*, akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan ekslusifitas dan sensifitas kepentingan kelompok. *Ketiga*, kesenjangan sosial, ekonomi dan politik. Kesenjangan dalam berbagai bidang ini mempermudah para pengikut agama terseret dalam arus persaingan, pertentangan dan bahkan permusuhan antar kelompok. M. Atho Mudzhar, "Permberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Damai di Dunia Damai untuk Semua, (Jakarta: Balitbang RI, 2004), 15.

agama, ras, ekonomi, ilmu pengetahuan, bangsa, negara, hingga aspirasi politik. Dalam kaitan inilah disebut bahwa pluralitas telah menjadi keniscayaan yang *taken for granted*.[3]

Secara garis besar, gambaran kehidupan beragama dapat dilihat dari laporan tahunan Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, The Wahid Institute, SETARA Institute. Sejauh rekaman konflik keagamaan di Indonesia dilacak, terlihat beberapa pola konflik. *Pertama,* konflik antarumat agama yang berbeda. Contoh kasusnya dapat dilihat dari pelarangan pembangunan rumah ibadah. *Kedua,* konflik antar umat beragama dengan umat beragama lain yang dianggap sesat –kasus kekerasan terhadap pengikut ahmadiyah. *Ketiga,* konflik intern umat beragama –bentrokan Sunni-Syiah.

Banyaknya konflik yang terjadi membutuhkan berbagai pendekatan yang solutif dalam menanganinya. Namun sayangnya, sering ditemukan penanganan konflik selalu dilakukan setelah terjadinya konflik, dan akan berhenti ketika keadaan sudah dianggap aman atau rukun. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha yang serius dan berkesinambungan agar pihak-pihak yang pernah terlibat konflik baik langsung maupun tidak langsung bisa rujuk kembali dalam damai melalui usaha-usaha peningkatan kerukunan hidup dalam kebersamaan yang hakiki. Salah satu upaya yang paling efektif adalah pembudayaan *religious peacebuilding* di kalangan umat beragama. Upaya pemeliharaan atau pemulihan keharmonisan hubungan sosial dan kerukunan umat beragama dipandang perlu untuk melibatkan semua komponen masyarakat secara komprehensif dan integratif.

Berbagai konflik yang terjadi menunjukkan kepada kita bahwa di negeri ini masih cukup jauh untuk bisa dikatakan damai. Dalam hubungan ini, memahami perdamaian seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan untuk menciptakan dunia yang lebih nyaman. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan perdamaian, potensi budaya sebagai sarana menuju keharmonisan hidup masyarakat dengan memaksimalkan peran negara dan masyarakat sipil untuk memelihara perdamaian yang akan dan telah dibangun.

Tugas dan Esensi Pendidikan Agama Islam: Antara Idealitas dan Realitas

Pada umumnya dalam proses pengajaran PAI, aspek yang paling diutamakan adalah hukum agama dan akidah –dengan pendekatan pengajaran yang sangat rentan dengan muatan eksklusifisme dan fundamentalisme. Di satu sisi PAI merupakan aspek penting dalam pembentukan moral generasi dan menguatkan kepribadian bangsa. Namun di sisi lain PAI sangat rentan dikotori oleh semangat fundamentalisme yang lambat laun membentuk kepribadian generasi yang puritan dan eksklusif.

PAI secara umum belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan moralitas dan spiritualitas peserta didik. Permasalahannya tidak sepenuhnya ada pada meteri pelajaran, tetapi juga pada proses pengajarannya. Peserta didik selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks (kognitif) saja, sehingga

[3] Lihat M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

subtansi berupa penanaman nilai agama (afektif dan kepribadian) hilang begitu saja.[4] PAI yang diajarkan selama ini pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi lebih bersifat *transfer of knowledge.* Anak didik diajarkan untuk memprioritaskan percaya pada doktrin agama, tanpa harus mempertanyakannya. Klaim kebenaran (*Truth claim*) begitu melekat dan diiringi dengan praktek ritual-ritual keagamaan. Fragmentasi materi dan kurangnya keterkaitan dengan konteks yang dihadapi sehari-hari yang menyebabkan peserta didik kurang menghayati nilai-niali agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Ironisnya dalam proses pengajaran PAI yang terjadi hanya menggunakan "kacamata kuda" sehingga seringkali memarginalkan –untuk tidak menyebutkan melupakan- realitas keberagamaan kelompok lain yang tidak seagama. Kenyataan ini seringkali diacuhkan hanya karena mereka berbeda agama. Hal ini sering diremehkan dan dilupakan oleh para pendidik, bahwa siswa/generasi muda umumnya akan membaur dengan masyarakat yang multikultural.

Pembelajaran yang bersifat leterlek atau doktrinasi semacam ini selain membunuh daya kritis anak didik, juga seakan-akan meletakan realitas multikultural pada ranah sekunder. Sehingga *output* dari proses pendidikan semacam ini tidak bisa diharapkan untuk bersikap adil dan bijak ketika dihadapkan dalam realitas kemajemukan di Indonesia.

Realitas multikultural seakan hanya menjadi wacana tanpa arah, karena sejak dini peserta didik telah ditanamkan nilai-nilai parsial, dalam hal ini moral agama, sementara nilai-nilai universal yang berpedoman pada hukum positif dan sejajar dengan rasionalitas sama sekali tidak diutamakan. Pendidikan semacam ini hanya akan menciptakan manusia-manusia dengan perspektif sempit tentang nilai dan moral. Tidak heran jika di Indonesia banyak terjadi konflik yang melibatkan ummat beragama, karena sejak dini masyarakat telah dididik untuk eksklusif, intoleran, dan hidup secara individual.

Berbagai fakta terkait dengan moralitas maupun isu radikalisme dan terorisme yang mewarnai media massa dewasa ini menunjukan indikasi kegagalan PAI dalam pembentukan moral dan menumbuhkan sikap kebhinekaan yang mengedepankan toleransi terhadap perbedaan etnis, suku dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun bukan merupakan tanggung jawab utama pendidikan agama Islam. Namun setidaknya, PAI memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk moral dan kesadaran generasi muda.[5]

Tugas dan esensi pendidikan agama menurut M. Amin Abdullah adalah untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran dari "dalam" intern masing-masing kelompok pemeluk agama-agama itu sendiri. Kekuatan penggerak yang mendorong untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran sebenarnya terletak dan terinspirasikan dari pengalaman pokok dari setiap kelompok agama, yakni pesan perdamaian dari al-Qur'an bagi pemeluk agama Islam, jalan Yesus

[4] Sutrisno, *Pembaruan dan Pengembangan Pendidikan Islam,* (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 85
[5] Max Weber meyakini bahwa agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia. Lihat Max Weber, *Sosiologi Agama,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 1-28

bagi orang-orang Kristiani, Taurat bagi pemeluk Yahudi dan ajaran sang Budha bagi pemeluk agama Budha.

Sangatlah penting bagi pendidikan keagamaan (*religious education*) untuk berasumsi bahwa tugas internalnya adalah untuk memperkenalkan "sistem tanggung jawab bersama" (*system of responsibility*) kepada generasi muda sesuai dengan panduan ajaran agama masing-masing. Ketika para pemeluk agama-agama mengenal dengan baik akar-akar fundamental ajaran agamanya masing-masing. Ketika para pemeluk agama memahami ajaran agamanya dengan baik, maka mereka telah membekali dirinya untuk membuka diri dan berdialog dengan masyarakat umum yang berbeda pandangan dan golongan dengan dirinya.

Semua jenis pendidikan keagamaan (*religious education*) seharusnya dibekali dengan cara, metode dan jalan yang lebih menekankan pada "penghormatan" dan "penghargaan" kepada masyarakat dan memeluk agama lain serta mengenal tata cara hidup dan nilai-nilai yang mereka jadikan panduan kehidupannya. Generasi muda hendaknya dipersiapkan untuk dapat hidup bersama, berdampingan dengan orang, kelompok atau pemeluk agama lain tanpa perlu dibebani oleh beban-beban psikologis dan hambatan-hambatan sosio-kultural yang bersumber dari sikap buruk sangka (*prejudice*). Mengarahkan mereka pada kemampuan untuk beradaptasi, mendengarkan dan memahami orang atau kelompok lain yang berbeda. Dengan demikian akan membuka cara berpikir baru dan cara melihat persoalan bersama dengan pandangan yang lebih terbuka.

Menurut Asmuri, diperlukan kontekstualisasi pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan umum merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini diperlukan agar peserta didik tidak "terperangkap" dalam ideologisasi atau sakralisasi penafsairan ulama terdahulu yang kurang relevan dengan konteks sekarang.[6] Paaradigam teosentris selama ini lebih mendominasi dalam sistem PAI, sehingga mengakibatkan muatan materi tersebut kurang membumi dan kurang teraktualisasi dalam kehidupan praktis. Begitu juga pendekatan dan metode yang diterapkan dalam sisitem PAI mengalami kejumudan, dan hilangnya kreativitas berpikir di kalangan para pendidik untuk mengembangkan metode dan pendekatan yang bermacam-macam dalam pembelajarannya.

Paradigma tradisional yang bersifat teosentris sudah saatnya mengalami perubahan yaitu kepada paradigma teo-antroposentris.[7] Paradigma teo-antroposentris berusaha untuk mengkoneksikan antara PAI dengan realitas yang senantiasa dinamis. Paradigma ini juga berperan menyatukan ilmu alam dengan landasan etik moral Islam yang akan memberi mafaat bagi seluruh alam ini

[6] Asmuri, "Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam: Shifting Paradigma dan Implementasinya," Jurnal Mukaddimah Volume 16 No. 2, 2010, hlm. 225

[7] Perubahan paradigma teosentris ke teo-antroposentris merupakan hasil pemikiran kritis terhadap paradigma tradisional yang selama ini dipegang. Paradigma ini lahir dari pemikiran para intelektual modern seperti Fazlur Rahman, menurutnya krisis metodologi sebagai penyebab kemunduran pemikiran Islam, karena alternatif metodologi dipandangnya sebagai titik pusat penyelesaian krisis intelektualisme Islam. Menurut Rahman, pelaksanaan pendidikan Islam belum mengacu dan mengantisipasi zaman yang berubah, tetapi hanya menjaga dan melestarikan warisan klasik. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm. 263-281

(*rahmatan lil 'alamin*).

Dalam perspektif historis, paradigma teo-antroposentris dalam proses pendidikan Islam telah dilakukan pada masa-masa awal perkembangan Islam. Rasulullah sejak awal telah mengimplementasikan metode pendidikan yang tepat apad sahabat-sahabatnya. Rasulullah saw sangat memperhatikan situasi, kondisi dan karakter seseorang, sehingga nilai-nilai islami dapat ditransfer dengan baik. Demikian juga strategi Nabi dalam melakukan transformasi sosial di Mekkah dan Madinah, tidak selalu destruktif, tetapi kadang-kadang adaptif, yaitu menyesuaikan dengan tradisi asyarakat dengan cara memperbaiki atau menguatkannya.[8]

Dengan demikian, kontektualisasi PAI merupakan suatu keniscayaan terutama pada konteks globalisasi seperti sekarang ini. Dalam implementasinya tetntu harus diawali dengan perubahan paradigma sistem pendidikan agama Islam sebagai landasan fundamnetal yang meliputi seluruh elemen terkait. Selain itu, globalisasi juga dapat menyebabkan paradoks bagi praktik pendidikan agama Islam. Terjadinya kontra moralitas antara yang apa yang diidealkan dalam ajaran Isam (normativ) dengan realitas di lapangan (historis). Dengan demikian, kontekstualisasi PAI mewacanakan dengan melihat kenyataan di masyarakat terlebih dahulu, sehingga ajaran Islam yang hendak diajarkan itu dapat *landing* dan sesuai dnegan kondisi masyarakat.[9]

Peran Pendidikan Agama Islam dalam Resolusi Konflik dan Perdamaian

1. Pendidikan Agama Islam Berorientasi Dialog

Pluraliras keberagamaan masyarakat di Indoenesia sudah sangat sarat dengan ketegangan. Dialog diakui sebagai salah satu cara penting untuk membudayakan hidup rukun dan harmonis di antara seluruh umat beragama. Setiap agama memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai problematika kehidupan umat manusia dan bangsa. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama wajib turut serta mewujudkan terbinanya ko-eksistensi dan saling menghargai.

Dialog merupakan bentuk aktivitas yang memupuk keterbukaan. Dialog dinilai sangat penting untuk menyingkap ketertutupan yang selama ini menyelimuti hubungan antar agama.[10] Dialog diharapkan dapat saling membantu membangun bangsa dan menghadapi persoalan hidup. Pentingnya dialog ini menurut Hans Kung adalah sebagai upaya mewujudkan tatanan dunia yang beretika, sehingga tercipta kehidupan yang damai; dan perdamaian tidak akan terwujud tanpa perdamaian antar agama-agama dan tanpa adanya

[8] Al-Qur'an tidak diturunkan dalam masyarakat yang hampa akan nilai, melainkan pada masyarakat yang sarat akan nilai-nilai kultural dan sosial. Lihat Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an,* (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 38

[9] M. Amin Abdullah, *Filsafat Agama dan Resolusi Konflik,* Makalah Tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

[10] Nurcholish Madjid, dkk, *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 200

dialog.[11]

Dialog dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide yang diformulasikan dengan cara yang berbeda-beda. Dialog merupakan pertukaran timbal balik dari pandangan-pandangan antara orang-orang yang telah memiliki satu kepedulian murni terhadap satu sama lain dan mereka yang terbuka untuk belajar satu sama lainnya.

Oleh karena demikian, untuk menciptakan kondisi damai (*peace building*) dalam masyarakat di tingkat *grassroots*, hendaknya Pendidikan Agama Islam juga mengambil bagian. Pengajaran PAI agar tidak terkesan bersifat parsial, semestinya berorientasi dialog, dalam arti memberikan pengenalan awal akan realitas keberagamaan di Indonesia yang cukup beragam. Pengajaran PAI yang mengarah pada dialog antar umat beragama diartikan sebagai transformasi bahasa kasih sayang Tuhan yang diekspresikan dalam hidup. Dialog merupakan pertemuan hati dan pikiran dari pemeluk agama yang berbeda dalam upaya saling memahami (toleransi) sehingga pada akhirnya menghapuskan kesan Islam –dalam mayoritas persepsi pemeluk agama lain- sebagai agama yang "garang", dan Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* tetap terjaga.

2. Pendidikan Agama Islam dengan Perspektif Pendidikan Multikultural

Dalam studi kultural, pendidikan merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses membudaya. Kebudayaan dalam arti tertentu merupakan suatu peta yang menjelaskan ke mana arah suatu komunitas hidup dan bergerak, atau oleh Clyde Klukhohn seperti yang dikutip oleh H.A.R Tilaar, adalah suatu *road map* dari kehidupan suatu komunitas. Apabila budaya adalah *road map* maka arti agama sebagai petunjuk jalan dari tingkah laku manusia dalam suatu komunitas memegang peranan yang sangat menetukan. Agama adalah norma-norma yang diyakini menjadi pedoman tingkah laku manusia di dalam komunikasinya terhadap sesame manuasia, terhadap lingkungan dan terhadap Tuhannya.[12] Pengajaran agama sebagai suatu bentuk kebudayaan tentunya harus sejalan dengan pendidikan keagamaan dalam suatu masyarakat. Dimana kedua-duanya mengenal hegemoni nilai-nilai dalam kehidupan bersama.

Di satu sisi, sebagai Negara yang beragama sudah semestinya etika dan moral sangat penting dimiliki oleh bangsa ini, sehingga perlu adanya penerapan pendidikan agama (baca: PAI) dalam sekolah formal sebagai satu solusi dari tanggungjawab moral Negara. Di sisi lain muncul semacam ketidakpercayaan terhadap pendidikan agama dalam membentuk etika dan moral sebagaimana

---

[11] *No ordering of the world without a world ethic; no peace among the nations without peace among the religions; no peace among the religions without dialogue among the religions.* Najiyah Martiyam (ed), *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim,* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2010), hlm. 5

[12]H.A.R Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional,* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hlm. 231

yang dikehendaki, karena memang bukti-bukti yang sudah ada menunjukan hal itu.[13]

Dalam kehidupan masyarakat beragama, sudah selayaknya etika dan moralitas agama juga turut menjiwai aktifitas kehidupan. Dalam konteks Indonesia, agama menghadapi tantangan yang serius anatara lain belum tercapainya kerukunan intern dan antar umat beragama dan adanya inkonsistensi antara pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Permasalahan yang selanjutnya adalah pendidikan agama yang diberlakukan di lembaga pendidikan formal selama ini belum dapat mewarnai perilaku masyarakat. Hal itu antara lain karena muatan kurikulumnya yang kurang komprehensif, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran, belum optimalnya kegiatan belajar mengajar, serta belum memadainya jumlah dan mutu tenaga kependidikan.[14]

Secara makro, persoalan etika dan moral memang bukan semata tanggungjawab sekolah (lembaga pendidikan formal), karenanya harus melibatkan beberapa pihak semisal keluarga, lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan, serta tempat-tempat ibadah. Prinsip moral dan etika yang awalnya bersumber dari aneka agama besar kini sudah mengalami universalisasi. Prinsip kebaikan, kebenaran, kejujuran sudah tidak bias lagi dimonopoli oleh satu agama tertentu. Prinsip itu bahkan sudah mengambil bentuk di segala bidang kehidupan. Tidak terbatas hanya diajarkan oleh pelajaran agama, prinsip moralitas publik ini sudah menjadi bagian dari kode etik setiap sistem pengajaran, perkuliahan, pemerintahan dan profesi.[15] Dengan kata lain, prinsip dasar agama diluar ritualnya sudah diadopsi dalam aneka kehidupan yang sudah tidak bias lagi diklaim sebagai milik agama tertentu. Moralitas agama sudah demikian universal sehingga tidak bisa lagi dikerangkeng dalam formalisme sempit matakuliah atau pelajaran agama.

Keburukan moral yang terjadi di negeri ini sudah sangat meluas. Bangkrutnya moralitas public ini agaknya tidak dapat diatasi dengan formalisasi pendidikan agama di sekolah umum. Merujuk pada pernyataan Haidar Bagir, bahwa pendidikan agama Islam yang hingga kini diajarkan pada peserta didik hanya mementingkan aspek kognisi (pengetahuan-intelektual). Hal ini tidak menjadikan peserta didik menjadi manusia yang saleh secara individu maupun social.[16]

Dalam hal ini PAI dianggap tidak berhasil dalam membentuk perilaku dan sikap keberagamaan seperti yang diharapkan, yaitu yang mencerminkan iman

---

[13]Ali Muhdi Amnur, *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hlm. 174

[14]Ibid., hlm. 174-175

[15]Denny J. A, Frans Surdiasis, *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan atas Transisi Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 39

[16]Haidar Bagir, "Gagalnya Pendidikan Agama" Kompas, Edisi 28 Februari 2003

dan takwa. PAI juga dipandang kurang berhasil menumbuhkan sikap toleran dalam menghadapi berbagai perbedaan diantara umat beragama, baik inntra maupun antar agama. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat banyak perbedaan dalam hal-hal keagamaan, khususnya menyangkut masalah *furuiyyah,* bukan hal-hal pokok. Meski demikian, pertikaian dan konflik bisa muncul jika perbedaan-perbedaan itu disikapi umat secara bijak. Kebijaksanaan dan kearifan untuk secara toleran menerima perbedaan dan keragaman tidak bisa datang dan tumbuh sendiri, melainkan harus ditanamkan dan dikembangkan. Karena itu pendidikan agama tetap diperlukan, tentunya dengan orientasi yang baru.

Orientasi pendidikan agama yang baru menurut Azzumardi Azra yaitu: *Pertama,* dengan menekankan perspektif multikulturalisme yang pada dasarnya menekankan adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan-perbedaan yang memang tidak bias dielakkan umat beragama manapun. *Kedua,* memperbaiki metode pembelajaran yang berorientasi multikultural tersebut, dari penekanan kuat pada aspek kognitif kepada afektif dan psikomotorik. *Ketiga,* peningkatan kulitas guru baik dari sudut pemahamannya atas agamanya sendiri maupun agama orang lain, sehingga mereka sendiri dapat memiliki perspektif multikulturalisme yang tepat.[17]

Wacana tentang pendidikan agama dalam perspektif multikulturalisme ini masih merupakan sesuatu yang baru dan banyak menimbulkan pertentangan, seperti masih relative barunya wacana multikulturalisme di Indonesia. Multikulturalisme biasa didefinisikan sebagai geakan social-intelektual yang mendorong nilai-nilai keberagamaan (*diversity*) sebagai prinsip inti dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok diperlakukan setara (*equal*) dan sama-sama dihormati. Menurut Zakiyuddin Baidhawy, pendidikan multikultural sesungguhnya adalah *the art of mananging diversity and the politic of difference,* yaitu seni mengelola keragaman sekaligus kehendak dan sistem politik pengakuan akan keberbedaan. [18]

Pendidikan multikultural dalam konteks pendidikan agama menurut Baidhawy memiliki beberapa karakteristik-karakteristik utama yang meliputi: belajar hidup dalam perbedaan, rasa saling percaya, saling memahami, saling menghargai, berpikir terbuka, apresiasi dan interdependensi resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan.[19] Sehingga pendidikan agama berwawasan multikultural adalah gerakan pembaharuan dan inovasi pendidikan agama dalam rangka menanamkan kesadaran pentingnya hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan agama-agama, dengan spirit kesetaraan dan kesedarajatan, saling percaya, saling memahami, dan menghargai persamaan, perbedaan dan keunikan agama-agama, terjalin dalam suatu relasi dan interdependensi dalam situasi saling mendengar dan menerima perbedaan

[17]Azzumardi Azra, *Dari Harvard Hingga Mekkah,* (Jakarta: Republika, 2005), hlm. 149-150

[18]Zakiyuddin Baidhawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural,* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), hlm. 36

[19]Ibid., hlm. 78

perspekif agama-agama dalam satu dan lain hal dengan pikiran terbuka, untuk menemukan jalan terbaik mengatasi konflik antaragama dan menciptakan perdamaian melalui sarana pengampunan dan tindakan nirkekerasan.[20]

Dari sudut pandang keagamaan, pendidikan multikulturalisme mencoba memperluas dan melanjutkan dua sikat terhadap "*the other*" yang telah dikembangkan, yaitu inklusif dan pluralis. Pendidikan multikulturalisme menekankan pada upaya penanaman dan penumbuhkembangan kedewasaan dalam menghadapi pluralism dan multikulturalisme yang muatannya meliputi multireligi, multikultural, multietnik, relasi gender dan multiideologi.[21]

Pendidikan agama berwawasan multikultural dialamatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional akanpendidikan yang secara berkesinambungan merepresntasikan keanekaragaman wajah agama dan kultural dan perjumpaannya dalam kesetaraan dan harmoni. Wacana dan praktek pendidikan agama semacam ini menekankan multikulturalisme sebagai suatu kemungkinan dan kesempatan untuk saling belajar tentang mempersiapkan untuk merayakan pluralitas agama dan etnik secara kultural melalui dunia pendidikan.[22]

Akhirnya, mengutip Azzumardi Azra, pendidikan agama dari segi konstelasi peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah terkandung prinsip dan perspektif pendidikan multikultural. Ketentuan tersebut pada prinsipnya memiliki dua tujuan khusus. *Pertama,* untuk menjaga penyimpangan atau kesalahan penafsiran norma agama yang mungkin bias terjadi jika diajarkan oleh guru yang tidak seagama. *Kedua,* dengan adanya guru yang seagama dengan peserta didik maka dapat lebih terjaga kerukunan hidup beragama diantara peserta didik berbeda agama yang belajar pada satuan pendidikan yang sama. Dan yang *ketiga* menurut Azra adalah agar terjadi profesionalisme dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan pendidikan agama.[23]

KESIMPULAN

Sulit untuk dimungkiri kenyataan bahwa agama memang berpotensi memicu konflik, utamanya pada tahap dimana pemaknaan atas agama oleh kelompok tertentu dianggap paling benar dan purna. Dalam kondisi tertentu, agama dapat dimainkan untuk mempertajam konflik yang terkadang bersumber dari persoalan ketimpangan sosial-ekonomi. Atau bahkan dijadikan alat mobilisasi demi kepentingan-kepentingan politis. Oleh karenanya, perlu adanya upaya-upaya mendorong umat beragama kembali melakukan *inward looking* (pengkajian ke dalam), yang dalam bahasa Khaled Abou Al Fadl disebut sebagai Introspeksi dan kritik diri, atau pengembangan spiritualitas esoterik dalam istilah Max Muller. Apapun jenis tawaran itu, yang terpenting adalah upaya tanpa lelah untuk

[20]Ibid., hlm. 85
[21]Ibid., hlm. 85
[22]Ibid., hlm. 86
[23]Azzumardi Azra, *Dari Harvard…..,* hlm, 151-152

menciptakan kondisi dunia yang damai, bersandar pada moralitas yang humanis dalam nuansa keberagamaan yang dewasa.

Menanggapi hal tersebut, Pendidikan Agama Islam (PAI) pada prinsipnya berpotensi untuk mewujudkan pendidikan yang membantu untuk membangun dan menjaga perdamaian dalam upaya menghindari dan meminimalisir konflik, khususnya konflik antar umat bergama. Pendidikan agama Islam yang berperspektif multikultural dan berorientasi dialog harus terus diupayakan secara kolaboratif dengan institusi-institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan serta organisasi-organisasi pemerintah mauupun non-pemerintah lain yang berkaitan, untuk mempersiapkan visi baru bagi peran pendidikan agama dalam masyarakat. Bila pendidikan agama Islam hendak memainkan peran positif dalam membangun masyarakat damai dan harmoni dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin 2011. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, M. Amin, 2011. *Filsafat Agama dan Resolusi Konflik,* Makalah Tidak dipublikasikan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Amnur, Ali Muhdi 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional,* Yogyakarta: Pustaka Fahima.

Asmuri, "Kontekstualisasi Pendidikan Agama Islam: Shifting Paradigma dan Implementasinya," Jurnal Mukaddimah Volume 16 No. 2, 2010

Azra, Azzumardi, 2005. *Dari Harvard Hingga Mekkah,* Jakarta: Republika.

Baidhawy, Zakiyuddin, 2005. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural,* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Bagir, Haidar, "Gagalnya Pendidikan Agama" Kompas, Edisi 28 Februari 2003

J. A, Denny dan Surdiasis, Frans, 2006. *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan atas Transisi Demokrasi Indonesia,* Yogyakarta: LkiS.

Madjid, Nurcholish dkk, 2004. *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina dan The Asia Foundation.

Martiyam, Najiyah (ed), 2010. *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim*, Yogyakarta: CRCS UGM.

Mudzhar, M. Atho 2004. "Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin Agama dalam rangka Keharmonisan Hubungan antar Umat Beragama" dalam Damai di Dunia Damai untuk Semua, Muhaimin Ag (Ed), Jakarta: Balitbang RI.

Rahman, Fazlur, 2000. *Islam*, Bandung: Pustaka.

Shihab, Umar 2005. *Kontekstualitas al-Qur'an,* Jakarta: Penamadani.

Sutrisno, 2011. *Pembaruan dan Pengembangan Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Fadilatama.

Tilaar, H.A.R, 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Weber, Max 2002. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD.

Yakin, M. Ainul 2004. *Pendidikan Multikultural: Cross-culture Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005